

**Bulletin of Islamic Research**

ISSN (Online): 3031-4526

Received: 15-02-2024, Revised: 15-03-2024

Accepted: 15-04-2024, Published: 04-06-2024

DOI: 10.69526/bir.v2i1.28

**Islam dan Lembaga Negara****Dewi Sukmawati<sup>1</sup>; Galuh Pajar Pratama<sup>2</sup>; Davi Abdullah<sup>3</sup>****Abstract**

Indonesia has a well-organized institutional framework, especially in a democratic context that prioritizes citizens' rights. An ideal democratic country is one that gives supreme power to its people, has responsible citizens, a government that is managed by the people, and authority that is exercised by the people. The approach in this context refers to the point of view used by a researcher to examine data from the literature interpretation. Choosing a particular approach or point of view in research really depends on the research question you want to answer. In this research, the method applied is an interpretive approach, namely an approach that allows researchers to interpret interpretive texts or literature with the aim of providing an explanation of the content of the interpretation being studied. Janedjri stated that every position established by law can be called an instrument of the state, The meaning also refers to humans who carry out functions or positions in activities within the framework of the state. This meaning goes beyond the physical structure of state institutions. However, if interpreted strictly, state institutions are institutions that have a certain legal status determined by the Constitution. The state is an abstract entity that is realized in its totality. Surah Ibrahim verse 35 and Saba verse 15 relate to the regulation of government institutions in the Maudhu'i system. Based on the interpretations of several scholars, the conclusion can be drawn that a safe country is one inhabited by individuals who always remember Allah and ask Him for forgiveness.

**Keywords:** Islam; Lembaga Negara; Al-Qur'an.

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, Email: [dewsukma1326@gmail.com](mailto:dewsukma1326@gmail.com)

<sup>2</sup> UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, Email: [davi210503@gmail.com](mailto:davi210503@gmail.com)

<sup>3</sup> UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, Email: [galuhfajar790@gmail.com](mailto:galuhfajar790@gmail.com)

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan kerangka kelembagaan yang terorganisir dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan demokrasi. Demokrasi adalah jenis pemerintahan yang mengutamakan hak-hak warga negara. Negara dengan sistem demokrasi yang dapat diterima adalah negara yang rakyatnya memegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi, mempunyai warga negara yang bertanggung jawab, pemerintahan yang dikelola oleh rakyat, dan otoritas yang dilaksanakan oleh rakyat[1].

Ada permasalahan di Indonesia yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah tentang penegakan khilafah. Pembahasan mengenai khilafah memang selalu menarik untuk disimak, apalagi jika dikaitkan dengan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat ini[2]. Kini terdapat sejumlah gerakan politik di tanah air yang berupaya mengubah konsep negara secara mendasar, yang berlandaskan pelestarian kekhalifahan Islam, atau sistem Dawlah Islamiyah, dan penegakan hukum Islam.

Lembaga negara adalah suatu organ pengisi dan pengatur negara. Tanpa lembaga negara, suatu negara tidak dapat berfungsi. Pemahaman al-Qur'an tentang konsep kelembagaan didasarkan pada QS. Saba ayat 15 dan Al-Balad ayat 1 dan 2. Kitab suci terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW[3]. Selain Sunnah dan Al-Qur'an, Al-Qur'an dimaksudkan sebagai sumber akhlak dan standar serta sebagai pedoman jalan hidup umat manusia.

## Metode

Pendekatan dalam konteks ini merujuk pada sudut pandang yang dipakai oleh seorang peneliti untuk mengkaji data dari literatur tafsir. Pemilihan pendekatan atau sudut pandang tertentu dalam sebuah penelitian sangat bergantung pada pertanyaan penelitian yang ingin dijawab[4]. Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan ialah pendekatan interpretatif, yaitu pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk menafsirkan teks atau literatur tafsir dengan tujuan memberikan penjabaran terhadap isi tafsir yang sedang ditelaah.

## Diskusi dan Pembahasan

### Pengertian Islam dan Lembaga Negara

Dari segi bahasa, lembaga negara biasanya disebut dengan "Staatsorgaan" dalam bahasa Belanda atau "badan negara" atau "organ negara" dalam bahasa Indonesia. Istilah Arabnya adalah منظمة (Munazzamaatun), artinya organisasi, atau منظمات (Munazzamaatun) dalam bentuk jamak. Lembaga negara mempunyai dua arti jika dilihat dari terminologinya: arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pada prinsipnya siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang

ditentukan oleh suatu tata-hukum (legal order) adalah organ negara (pen lembaga negara). Janedjri menyatakan, setiap jabatan yang ditetapkan dengan undang-undang dapat disebut sebagai alat negara, artinya juga menunjuk pada manusia yang menjalankan fungsi atau jabatan dalam kegiatan dalam kerangka negara. Makna ini melampaui struktur fisik lembaga-lembaga negara. Namun jika dimaknai secara tegas, lembaga negara adalah lembaga yang mempunyai kedudukan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar.

Negara adalah suatu tatanan yang terdiri dari satu atau lebih kelompok sosial yang hidup bersama dalam suatu wilayah (wilayah) tertentu dan mengakui adanya kerangka hukum yang menjunjung tinggi keamanan dan izin. Sebelum istilah "Lembaga" diubah, istilah tersebut tidak digunakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945. Misalnya, pasal 23(5) Komite Peninjau Uang memuat kata "badan"[5]. Demikian pula kata "badan" muncul dengan kata "pengadilan" pada pasal 24 UUD 1945. Dengan demikian, forum yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur suatu wilayah atau wilayah dalam suatu negara diartikan sebagai lembaga negara. Sehingga aturan dalam suatu negara dapat dicapai dan diterapkan sesuai dengan landasan hukum negara.

George Jellinek menegaskan, lembaga negara dapat digolongkan sebagai lembaga negara pengawal atau lembaga besar negara berdasarkan kedudukannya masing-masing. Kekuasaan negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilaksanakan oleh lembaga-lembaga primer negara, dan lembaga-lembaga penunjang negara dibentuk untuk membentengi lembaga-lembaga primer negara.

### **Sejarah Lembaga Negara dan Pergulatannya dalam Politik Islam**

Perspektif Islam terhadap lembaga negara sebagaimana menurut catatan sejarah Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya memperkenalkan ibadah mahdhah, karena umat Islam merujuk pada ritual kebaktian yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, hingga dunia Arab. Ajaran Islam mencakup berbagai bidang, namun komponen politik merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk dikaji[6]. Islam mengandung berbagai ungkapan, termasuk daulah dan khalifah, yang sering digunakan untuk menyebut suatu bangsa atau pemerintahan. Di dunia Islam, istilah "daulah" telah diterima dan memiliki arti penting di negara ini. Kata daulah dalam bahasa Arab modern berarti tanah. Itulah sebabnya negara-negara Arab disebut sebagai Daulah 'Arabiyah dan negara Islam disebut Daulah Islamiyyah.

Nama khalifah berasal dari bahasa arab lapadz khulafa yang artinya mengikuti atau menggantikan. Menurut catatan Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada menunjukkan bahwa nama "Khalifah" berasal dari Arab pra-Islam berdasarkan prasasti sejarah Arab dari abad ke-6 Masehi. Lebih lanjut dikatakan

bahwa ketika Abu Bakar terpilih menggantikan Nahi di Tsaqih Bani Sa'idah, gelar khalifah diberikan kepadanya secara dadakan. Satu-satunya umat Islam yang memiliki kesamaan gelar ini dengan khalifah adalah Muslim Sunni[7]. Muslim Syiah menyebut individu yang menjalankan pemerintahan mereka sebagai imam juga. Nama umum sistem politik Syiah adalah imamah. Kata imam dalam bahasa Arab berasal dari kata amma yang mempunyai dua arti: bergerak maju, menempuh jalan tertentu, memberi arahan dan bimbingan, menjadi pemimpin, dan menjadi teladan[8].

Era tsaqi Bani Sa'idah dianggap oleh sebagian ulama hukum Islam sebagai periode model pemilihan khalifah. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah didasarkan pada gagasan bahwa organisasi-organisasi perwakilan ini, seperti Ahl al-agd wa al-hall dan Ahl al-Hall waal-agd, serta ahl-Syuro, sangat penting bagi pemerintahan Islam. Contoh lain pembentukan lembaga perwakilan adalah ketika Umar membentuk dewan pembentukan untuk memilih khalifah masa depan.

Munawwir Sjadzali mengemukakan, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan qiyas, penyelenggaraan peradilan pertama kali diatur pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab[9]. Hal ini mencakup pembentukan beberapa hakim, penahanan penjara, dan penghentian gangguan publik atas nama khalifah. Meskipun demikian, Dinasti Umayyah sangat meningkatkan penyelenggaraan peradilan hingga akhir periode yang dikenal sebagai al-khulafa al-Rashidun, dan era Abbasiyah menyaksikan kemajuan baru dalam bidang ini. Pada masa Bani Umayyah, pemerintahan semakin membaik.

### **Tafsir-tafsir Ayat Mengenai Lembaga Negara**

Istilah-istilah kata yang selalu dihubungkan dengan konsep kenegaraan terdapat dalam buku Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Tematik Al-Qur'an) terbitan Kementerian Agama RI. Salah satu istilah kata tersebut adalah "al-balad." Istilah kata lainnya adalah "tashrif," atau perubahan bentuk dari yang semula berbentuk tunggal mufrad menjadi bentuk jamak al-bilaad, atau menjadi bentuk muannas (baldah)[10]. Kata (al-Qaryah) dalam bentuk jamak (al-Quraa) dan bentuk tunggal (mufrad) juga digunakan dalam Al-Qur'an. Istilah "ad-Daar" (mufrad) dan "ad-Diyar" (jamak) juga digunakan dalam Al-Qur'an.

Kesemua istilah kosa kata itu merujuk pada makna negara. Selain istilah kosa kata di atas, pada sejarah peradaban Islam dikenal istilah kosa kata (daulah) yang artinya negara. Perkataan (daulah) secara kebahasaan berarti nama bagi seluruh benda yang berputar dengan sendirinya.

## Al-Qur'an Surat Ibrahim Ayat 35

Al- Balad Bermakna Kota Makkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

“(Ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala.” Ibrahim [14]:35

Maksud dari kata al-balad ialah Makkah. Nabi Ibrahim berdo'a agar Mekkah menjadi negeri yang aman. Karena bila tidak ada keamanan, maka manusia tidak akan fokus pada urusan agama dan dunia[11]. Penafsiran ini serupa dengan surat al-baqarah mengenai do'a nabi Ibrahim yang dipanjatkan agar mekkah menjadi negeri yang aman dan jauh dari kekerasan.

Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan ungkapan “hadzal baladan aamina” (bangsa ini akan aman), At-Thabari dan Ats-Tsa'labi menjelaskan bahwa negara yang dimaksud adalah Al-Haram, atau Mekah[12]. Lebih jauh lagi, maksud dari doa “Baladan Aamina” yang dipanjatkan Nabi Ibrahim adalah untuk menjamin tidak hanya keamanan negara Mekkah tetapi juga hidup berdampingan secara damai seluruh warganya.

Makna ayat di atas menurut Hamka ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjadi pengingat bagi kaum Quraisy bahwa nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim AS, lah yang pertama kali merencanakan wilayah Mekkah. Lembah yang tak berpenghuni itu berkembang menjadi negara yang cukup besar seiring berjalannya waktu[13]. Mengenai niat Nabi Ibrahim mendirikan Mekkah sebagai tempat tatau rumah hanya untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT. Karena itu, ia memohon kepada Tuhan untuk melarang keturunannya menyembah berhala tersebut. Selain itu, ia berdoa kepada Allah agar lokasi sumbangannya menjadi "Hadzal Baladan Aaminan", atau negeri yang damai, keamanan abadi, dan tempat yang jauh dari kebingungan.

Menurut Quraish Shihab mengklaim bahwa Nabi Ibrahim berdo'a di atas untuk keselamatan Mekkah dan sekitarnya. Menjaga perdamaian di sana hingga akhir zaman, atau memberikan kesempatan kepada penduduk lokal dan tamu untuk hidup aman dan tenteram, adalah definisi perdamaian di sana. Ulama seperti Thabathaba'i dan Asy-Sya'rawi menafsirkan doa Nabi Ibrahim di atas berbicara tentang perdamaian tanpa peran umat, atau amun takwini. Para ulama ini menganggap hal ini berarti bahwa upaya dasarnya yang menghasilkan perdamaian.

Bukan hanya itu saja, untuk menciptakan perdamaian bersama, yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah *"amn tasyri'ih"*, permohonan kepada Allah untuk menetapkan hukum-hukum agama yang mewajibkan manusia untuk melaksanakannya serta menjaga dan menjaga perdamaian setiap saat.

Pada ayat diatas terlihat terdapat munasabah dengan ayat selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*"Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka (berhala-berhala itu) telah menyesatkan banyak manusia. Maka, siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk golonganmu. Siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Ibrāhīm [14]:36.

Masih ada referensi mengenai permintaan Nabi Ibrahim pada ayat sebelumnya di ayat ini. Nabi Ibrahim mendoakan keselamatan bangsa, namun ia juga berpesan agar keturunan dan cucunya tidak disesatkan oleh penyembahan berhala yang menyesatkan[14]. Penulis mengambil kesimpulan bahwa negara yang aman adalah negara yang aman, damai dan sentosa. Berdasarkan berbagai penafsiran dan penjelasan di atas. dimana masyarakatnya senantiasa menjunjung tinggi syariat agama dengan cara yang benar dan patut. Selalu jaga segala sesuatunya tetap berjalan dan sediakan keamanan. Keamanan di tempat ini adalah milik semua orang, bukan hanya individu, organisasi, atau pemerintah. untuk membangun sebuah negara di mana pengunjung dan warganya dapat terjamin keselamatannya.

### **Al-Qur'an Surat Saba ayat 15**

Al-Qur'an Surat Saba ayat 15 bermakna tanah atau negeri tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ ۖ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۚ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ  
وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya: "Sungguh, pada kaum Saba' benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun"

Dalam menafsirkan ayat ini. Ibnu Katsir menafsirkan dengan berbagai cara, berdasarkan penafsiran berbagai ulama tentang asbabun nuzulnya.

Menurut beberapa asbabun nuzul, pertanyaan para sahabat berujung pada turunnya ayat ini[15]. Dalam ayat ini, dia hanya memberikan sedikit penafsiran. Ia meyakini adanya tanda-tanda keesaan dan kemahakuasaan Allah di mana-mana di tanah Saba', antara lain dengan adanya dua buah taman yang tanahnya sangat subur di kanan dan kirinya[16]. Ia bahkan bercerita tentang bagaimana, jika seorang pejalan kaki meletakkan keranjangnya di atas kepalanya dan berjalan, keranjang itu akan terisi dengan berbagai buah-buahan yang jatuh tanpa dia sadari[17]. Selanjutnya, bendungan Ma'rib yang terletak di antara sisi gunung bendungan dan menjadi sumber sungai-sungai yang mengalir ke negeri Saba', juga merupakan simbol kekuasaan Tuhan.

Menurut penuturan Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Rabah, Farwah bin Malik Al-Ghathafani menoleh menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah." Pada masa jahiliah, kaum Saba terkenal karena keberanian dan kekuatannya. Saya khawatir mereka tidak akan menerima ajakan saya untuk menjadi Muslim. Bisakah saya melawan mereka? Rasulullah SAW bersabda: "Aku tidak diperintahkan apapun oleh Allah SWT mengenai mereka (kaum Saba)." Dengan demikian menjadi jelas ayat berikutnya: "Sesungguhnya dua kebun di kanan dan kiri rumah kaum Saba itu menjadi tanda (kekuatan Allah) bagi mereka. Katakanlah kepada mereka: "Makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.

Dalam tafsirnya, Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Saba' adalah kelompok masyarakat yang terletak di bagian selatan Yaman. Mereka semua tinggal di tanah yang subur yang sebagian penduduknya masih ada sampai sekarang ini. Dalam karyanya Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Ibnu 'Asyur menyebutkan bahwa asal muasal penyebutan negeri Saba' bermula dari kisah Nabi Sulaiman dan kerajaan Saba' yang memiliki sebuah ikatan batin dari alkisah Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman[18]. Kemudian cerita tersebut juga ada kaitannya dengan penduduk Saba' yang bertolak belakang dengan keadaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena keduanya dianggap sebagai suri tauladan dalam hal bersyukur nikmat yang Allah berikan, sedangkan penduduk kaum Saba' dijadikan perumpamaan sebagai orang-orang kafir dikarenakan sombong dan tidak bersyukur nikmat yang Allah berikan.

Ada hikmahnya bagi umat Islam. Kita harus bersyukur kepada Allah setiap kali kita menerima kesenangan. Hal ini berbeda dengan masyarakat Saba yang kurang bersyukur bahkan menjadikan mereka sombong. Hingga suatu hari diutus Rasul utusan Allah kepada mereka yang bertujuan senantiasa mengingatkan masyarakat Saba' untuk mengingat Allah[19]. Karena penduduk Saba' telah menyembah tuhan-tuhan selain Allah, maka Allah telah memberi mereka keridhaan dan menunjukkan kesalahan mereka. Namun masyarakat

Saba' tetap saja menolak bahkan memberontak, mengingkari segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka.

Munasabah dari ayat diatas terdapat pada ayat selanjutnya, yakni Qur'an Surat Saba' ayat 16, yang berbunyi : Artinya : "Tetapi mereka berpaling, maka Kami kirim kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit pohon Sidr"[20]. Berikut keadaan penduduk kaum Saba' Menurut Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh M Quraish shihab bahwasanya Allah jadikan negeri itu hancur dengan didatangkannya banjir besar dengan diruntuhkannya bendungan Ma'rib[21]. Setelah banjir terjadi kehidupan mereka menjadi sulit bahkan untuk bercocok tanam pun mereka harus mengandalkan dari air hujan dan tumbuhan yang mereka tanam pun tidak memberikan mereka manfaat. Mengenai pohon Atsl dan pohon Sidr ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan pohon cemara, pohon bidara, dan pohon berduri serta buah maja yang sangat pahit rasanya.

### **Persoalan prinsip dan kriteria**

Ketika membahas pemerintahan nasional dan Al-Quran, perlu dikaji prinsip-prinsip umum pemerintahan yang terkandung di dalamnya. Namun Al-Qur'an tidak menggunakan kata-kata khusus untuk menyebut bangsa atau organisasi nasional[22]. Negara adalah sesuatu yang abstrak dan diterapkan secara ketat; Tidak sama dengan yang disebut organisasi nasional atau kelompok militer nasional, atau dengan kata lain organisasi nasional adalah alat yang membantu suatu negara mencapai tujuannya.

Prinsip-prinsip Lembaga negara dalam tulisan ini ditelusuri dengan dua kata kunci dalam al-quran, yaitu al-balad dan al-mulk. Pertama, kata al-balad yang digunakan untuk menggambarkan institusi politik dalam Alquran, sebenarnya lebih menyinggung pengertian tempat tertentu bahkan disebut wilayah dalam ayat ini. Namun, ada satu prinsip tentang pengelolaan negara yang ditemukan[23]. Prinsip tentang tujuan keadaan aman inilah yang terkandung dalam do'a Nabi Ibrahim yang menggunakan istilah "baladan aminan" dan "al-balad al-amin". Dari sudut pandang semantik, istilah "aman" dan "amin" mengacu pada jaminan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual warga negara atau penduduk.

Kedua, kriteria Lembaga negara ini meliputi dua hal yaitu, 1). Perbedaan segi hierarki(landasan hukum pembentukanya). Hierarki Lembaga negara berbeda-beda, dan keragaman ini penting, karena status hukum Lembaga negara (lebih besar dan lebih rendahny harus diatur). Mengenai segi hierarki ini, terdapat tiga lapis Lembaga negara

- a. Lembaga tinggi negara
- b. Lembaga negara dan
- c. Lembaga daerah

Tujuan dari klasifikasi ini adalah agar perbedaan fungsi lebih mudah dipahami. Meskipun ada yang berfungsi sebagai peran pendukung atau tambahan, ada pula yang berperan utama atau utama. Lembaga negara terdiri dari tiga ranah: fungsi pengawasan, kekuasaan kehakiman (judicial function), kekuasaan legislatif (pencipta), dan kekuasaan eksekutif (pelaksana)[24].

Quraish Shihab menyoroti as-syura, keadilan, akuntabilitas, kepastian hukum, jaminan haq al'ibad (hak asasi manusia), dan hikmah penting kehidupan politik lainnya terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian Quraish Shihab menyatakan, "Tuhan telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menempuh jalan yang mereka yakini benar dan menyatakan pendapat secara beretika dan bertanggung jawab. Setiap orang berhak menjalankan kebebasan berpendapat, termasuk hak untuk mengikuti apa pun. agama yang mereka pilih. Kata-kata Al-Qur'an termasuk salah satu benih ajaran demokrasi, yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam banyak pedoman kitab suci ini dalam perang Uhud dan perangnya.

Menurut Jimly Asshiddiqie, agar sesuatu dapat di anggap sebagai organ atau Lembaga negara, setidaknya harus memenuhi lima kriteria yaitu

1. Setiap orang yang menjalankan peran sebagai pembuat undang-undang dan penegak hukum
2. Mereka yang memegang jabatan atau dipekerjakan oleh negara atau pemerintah saat melakukan tugas penegakan hukum
3. Badan atau organisasi yang menjalankan fungsi pencipta/penerapan hukum sesuai kerangkadan sistem ketatanegaraan atau pemerintahan. Ini mencakup Lembaga negara yang dibentuk baik ditingkat pusat maupun daerah melalui Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Presiden, atau Keputusan-keputusan yang lebih rendah.
4. Lembanganegara didirikan sesuai dengan kontitusi, undang-undang, atau peraturan mencakup Lembaga Tingkat pusat
5. Lembaga negara tersendiri yang kewenangannya dituangkan dalam Undang-Undang Dsar, sehingga dapat disebut sebagai lembagatinggi negara atau sebagai alat utama negara.

## **Kesimpulan**

Negara adalah sesuatu yang abstrak dan termanifestasi secara keseleruhan sebagai lawan dari apa yang dikenal sebagai organ atau lembaga negara, atau lembaga negara yang melengkapi perangkat-perangkat yang membantu mencapai tujuan negara, negara merupakan sesuatu yang abstrak dan diwujudkan secara totalitas. Berdasarkan temuan penelitian, Surat Ibrahim ayat 35 dan Saba ayat 15 berkaitan dengan pengaturan lembaga pemerintahan dalam sistem Maudhu'i. Berdasarkan tafsir dari beberapa ulama, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa menurut al-munir, negara yang aman adalah negara yang terdapat individu-individu yang terus mengingat Allah SWT dan memohon ampun kepada-Nya, begitu pula dengan pengertian Al-Mishbah yang menjelaskan bahwa suatu negara adalah setara terlepas dari adanya kejahatan dan kehancuran, namun hanya selama.

Berbagai penafsiran mengarah pada kesimpulan bahwa negara yang aman adalah negara yang tenteram, aman, dan tenteram. dimana masyarakatnya senantiasa menjunjung tinggi syariat agama dengan cara yang benar dan patut. Selalu jaga segala sesuatunya tetap berjalan dan sediakan keamanan. Keamanan di tempat ini adalah milik semua orang, bukan hanya milik individu, organisasi, atau pemerintah. untuk membangun sebuah negara di mana pengunjung dan warga negaranya dapat yakin akan perlindungan mereka.

## **Author Contributions**

**Dewi Sukmawati:** Conceptualization, Methodology, Writing – review & editing, Supervision, Project administration. **Galuh pajar Pratama:** Methodology, Writing – review & editing, Investigation. **Davi Abdullah:** Conceptualization, Methodology, Writing – review & editing, Investigation.

## **Acknowledgement**

I would like to thank Person one, Person two and an anonymous reviewer for providing valuable input on these papers.

## **Conflict of Interest**

The authors declare no conflicts of interest.

## **Funding**

This research did not receive any financial support.

## Bibliography

- [1] R. Alfi, N. Hasanah, R. Rifkiah, and A. A. Muhyi, "Contemporary Traditions and Challenges: Tafsir Maudhu' i' s Study of Islam and Fundamentalism," vol. 2, no. 2, pp. 131-152, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.7.
- [2] D. D. Hasanah, D. N. Salsabila, and H. A. Al, "Bagaimana Hubungan Islam dan Liberalisme dalam Perspektif Qur' an?," vol. 2, no. 1, pp. 53-70, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.17.
- [3] Y. F. Rozy and A. Nirwana AN, "PENAFSIRAN 'LA TAQRABU AL-ZINA' DALAM QS. AL-ISRA' AYAT 32 (STUDI KOMPARATIF ANTARA TAFSIR AL-AZHAR KARYA BUYA HAMKA DAN TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB)," *QiST J. Quran Tafseer Stud.*, vol. 1, no. 1, pp. 65-77, Feb. 2022, doi: 10.23917/qist.v1i1.525.
- [4] S. Amir, M. A. Norasid, and A. B. A. Hilmi, "Scientific Studies of the Qur'ān in the Contemporary Era: An Analysis of Concept, History, and Methodology," *J. Islam. Thought Civiliz.*, vol. 13, no. 1, pp. 188-202, 2023, doi: 10.32350/jitc.131.13.
- [5] M. I. Thaib, "Baitul Mal Aceh and Productive Zakat Education for Mustahiq," vol. 2, no. 2, pp. 187-204, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.11.
- [6] Y. Irbah, "Main The Principle Of Inter-Religious Tolerance ( A Comparative Study Of The Interpretation Of Surat Al Kafirun Between Hamka And Quraish Shihab)," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 20-32, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [7] A. Mukrimun, "Application Analysis Study and Implications of Rules 'Al-Ibratu BiUmūmi Al-Lafdzi Lā Bi Khushūshi As-Sabab' In Tafsir Mafātih al-Ghoīb," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 27-28, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [8] S. F. Fuadia, R. Aini, R. M. Soba, and A. A. Muhyi, "The Concept of The State in Islam: A Study of Maudhu' i' s Interpretation," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 1-20, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.6.
- [9] M. A. Muchsin and A. Manan, "Historical development of tax during the early islamic period: Jizyah and Kharaj," *J. Al-Tamaddun*, vol. 14, no. 2, pp. 1-7, 2019, doi: 10.22452/JAT.vol14no2.1.
- [10] A. A. Zahra, Y. Dahliana, and A. N. AN, "Sha'rawi's Perception of Economic Solutions for Home Women in QS Al-Ahzab Verse 33 with Tahlili Approach," *al-Afkar, J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 1, pp. 79-87, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.905.Abstract.

- [11] L. Z. Muktashi, A. N. An, S. Suri, U. M. Surakarta, U. M. Surakarta, and U. I. N. Ar-raniry, "Tinjauan Majas Isti'arah (Metafora) Terhadap Kata Qiradatan (Kera) Dalam Kitab Tafsir Kontemporer (Studi Kasus Ashabus Sabat Dalam Tafsir Quraish Shihab Dan Tafsir Wahbah Zuhaili)," *AL-AFKAR J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 2, pp. 994-1014, 2024, doi: 10.31943/afkarjournal.v7i2.1036.Majaz.
- [12] A. Nirwana AN, D. Mustofa, and S. Akhyar, "Contextualization Review of the Interpretation of the Verses of the Fathul Qulub Book at the IMM Sukoharjo Regeneration Program," *J. Ilm. Al-Mu ashirah*, vol. 20, no. 1, p. 146, Feb. 2023, doi: 10.22373/jim.v20i1.16939.
- [13] A. Nirwana, S. Hidayat, and S. Suharjianto, "أصول التفسير وقواعده عند تفسير عبد الله بن عباس," *J. Online Stud. Al-Qur'an*, vol. 16, no. 2, pp. 137-164, Jul. 2020, doi: 10.21009/JSQ.016.2.02.
- [14] P. Dewi, R. N. Putri, and A. A. Muhyi, "Islamic Views on Radicalism and Terrorism," vol. 2, no. 1, pp. 39-52, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.9.
- [15] A. F. R., "Hermeneutics of Gender : A Comparative Study of Hermeneutical Models Amina Wadud and Farid Esack," *Bull. Islam. Res.*, vol. 2, no. 1, pp. 21-38, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.10.
- [16] A. Syaripah, E. Zulaiha, and W. Taufiq, "Kepribadian Nabi Musa dalam Al-Quran ( Telaah Ayat- Ayat Musa dalam Al-Quran Tinjauan Teori Psikologi Kepribadian ) Pendahuluan," vol. 2, no. 2, pp. 97-130, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.19.
- [17] Z. Abidin, "Tafsir Maudhu'i: Study of the Qur'an on Business, Trade and Economy: Tafsir Maudhu'i: Kajian Al-Qur'an Mengenai Bisnis, Perdagangan Dan Perekonomian," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 57-72, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [18] N. Damayanti, S. A. Nurazizah, A. Fitriansah, and A. A. Muhyi, "The Concept Of Human Rights From The Qur'an Perspective," vol. 2, no. 2, pp. 169-186, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.20.
- [19] B. N. Hoir, "Thematic Tafsir Study: Religious Moderation in the Qur'an," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 43-56, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.
- [20] F. H. Akbar, F. L. Fasha, and F. Abdullah, "Konsep Moderasi Beragama dalam Tinjauan Qur'an Hadis Pendahuluan," vol. 2, no. 1, pp. 71-96, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i1.21.
- [21] F. Muhammad, "The Ethics Of Communication To Parents In Surah Maryam Ayat 42-48 (Study On Kitab Tafsir Al-Taysir By Firanda Andirja," *Bull. Islam. Res.*, vol. 1, no. 1, pp. 33-42, 2023, doi: 10.23917/bir.v1i1.123.

- [22] N. A. Prasanti, P. E. Adila, R. Mughiry, and A. A. Muhyi, "The Correlation between Islam and Globalization According to the Maudhu ' i Interpretation," vol. 2, no. 2, pp. 153-168, 2024, doi: 10.69526/bir.v2i2.13.
- [23] A. Nirwana, "DA'WAH IN THE QUR'AN (THEMATIC TAFSIR)," *J. At-Tibyan J. Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, vol. 4, no. 2, pp. 307-329, Dec. 2019, doi: 10.32505/at-tibyan.v4i2.1350.
- [24] A. Nirwana, S. A. S. Suri, M. Amin, S. Hidayat, and D. Junaedi, "Exploration of Wasatiah Diction to Realize Sustainable Tolerance Between Religious Communities: A Study of the Translation of the Quran of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia," *Rev. Gestão Soc. e Ambient.*, vol. 18, no. 6, p. e05717, Mar. 2024, doi: 10.24857/rgsa.v18n6-012.

## Copyright

© 2024 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.